



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **Wisnu Handoko,**
2. Jabatan : **SEKRETARIS BADAN**
3. NHK : **430605**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.900.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/21 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/21 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
3. Tanah Seluas 40 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	434.000.000
1. MOTOR, Honda Vario SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ MOBIL PENUMPANG Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA 1.5 G CVT MOBIL PENUMPANG Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 286.000.000		
4. MOTOR, YAMAHA AEROX SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERTAHAP	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.191.258.492
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.525.258.492



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.525.258.492

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.